

**FORMULIR NOMINASI REGISTRASI MEMORI KOLEKTIF BANGSA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

1.0 Judul Arsip yang diusulkan

Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia 1946 – 1949

2.0 Ringkasan

Yogyakarta sebagai ibu kota RI berlangsung mulai 04 Januari 1946 – 27 Desember 1949. Perpindahan ini dilakukan secara rahasia mengingat kondisi Jakarta yang waktu itu tidak aman. Rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri kabinet ke Yogyakarta dengan Kereta Api Luar Biasa sekitar pukul 18.00 WIB dan sampai di Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pukul 09.00 WIB. Rombongan kemudian tinggal selama tujuh pekan di kompleks Pakualaman. Hal ini dilakukan karena menunggu proses perbaikan istana negara Gedung Agung yang saat itu rusak sepeninggal Jepang.

Pengumuman perpindahan pemerintahan Republik Indonesia tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada malam harinya setelah rombongan presiden sampai di Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946. Kemudian, sebagian kementerian juga berkedudukan di Yogyakarta. Sebagian Kementerian Penerangan yang berpindah adalah bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi. Dalam pidatonya, Mr. Ali Sastroamidjojo menyampaikan alasan pemindahan pusat pemerintahan, yakni keadaan di Jakarta yang tidak aman dan untuk penyempurnaan organisasi dalam negeri.

Kemudian, sehubungan dengan pemindahan pusat pemerintahan tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana baik bagi keperluan institusi kementerian, maupun bagi anggota keluarga para Menteri. Untuk itu, Dewan Pertahanan Daerah Yogyakarta mengeluarkan pengumuman pembentukan Panitia Perumahan pada tanggal 6 Agustus 1946.

3.0 Identitas Pemohon

3.1 Nama Pemohon (individu atau organisasi)

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta

3.2 Hubungan pemohon dengan arsip yang diusulkan

Materi yang dinominasikan merupakan khazanah dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3 Alamat, Telepon dan Email

Jalan Raya Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta, Telp. (0274) 5018820, 5021980, Email : dpad@jogjaprovo.go.id

3.4 Narahubung

Budi Santoso, S.S., M.A.

3.5 Alamat, Telepon dan Email

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Telp. 085158266211, email: santoso008@yahoo.com

4.0 klasifikasi informasi yang diusulkan

Khasanah arsip terkait Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia bersifat terbuka sehingga dapat diakses oleh publik untuk berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk kepentingan layanan akses maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan digitalisasi, baik terhadap materi yang dinominasikan maupun *finding aids* untuk menelusuri materi.

Akses arsip dapat dilakukan dengan cara :

- 1) **Offline** : pengguna arsip datang langsung ke Layanan Arsip DPAD DIY di Gedung Depo Arsip Pemda DIY, Lantai Dasar, Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta :
 - Membaca fisik arsip
 - Membaca hasil digitalisasi arsip di aplikasi Media Akses (intranet)
- 2) **Online** : pengguna arsip mengakses
 - Aplikasi SIKS di dpad@jogjaprov.go.id/siks
 - Aplikasi JIKN di arsip.jogjaprov.go.id

5.0 Pernyataan Kewenangan

Saya menyatakan bahwa saya memiliki wewenang untuk mengusulkan arsip yang dijelaskan dalam dokumen ini menjadi Memori Kolektif Bangsa.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD)

Daerah Istimewa Yogyakarta

The image shows a circular official stamp of the Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta. The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH" at the top, "DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" at the bottom, and "DPAD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dra. MONIKA NUR LASTIYANI, MM

6.0 Informasi Hukum

6.1 Nama Pemilik (Jika berbeda dengan pengusul)

Nama : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55198
Telepon : (0274) 5018820
Surel : dpad@ jogjaprovo.go.id

6.2 Kustodian (Jika berbeda dengan pemilik)

6.2.1. Kasultanan Yogyakarta

Nama : GKR. Condrokirono
Alamat : Kawedanan Hageng Panitrapura Karaton Yogyakarta Hadiningrat
Telepon : 085106235001
Surel : khpanitrapura@gmail.com

6.2.2. Kadipaten Pakualaman

Nama : GPH. Indrokusumo
Alamat : Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman
Telepon : 08122742280
Surel :

6.3 Status Hukum

6.4 Status Hak Cipta

*Dokumen terlampir

7.0 Identitas dan deskripsi arsip

7.1 Judul dan identifikasi arsip yang diajukan

“Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia 1946 – 1949”

7.2 Media Rekam Arsip yang diajukan

a. Teksual

- Jumlah arsip teksual khasanah DPAD DIY 179 nomor berkas;
- Jumlah arsip teksual khasanah Kraton Yogyakarta 128 nomor berkas, dan
- Jumlah arsip teksual khasanah Puro Pakualaman 31 nomor berkas.

b. Foto

Jumlah arsip foto khasanah DPAD DIY 317 nomor

c. Audiovisual

Jumlah arsip audiovisual khasanah DPAD DIY 9 nomor

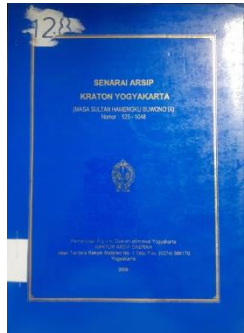

7.3 Daftar Rincian Arsip yang diajukan

a. Tekstual

- KHASANAH ARSIP DPAD DIY

NO	DAFTAR ARSIP	JUMLAH	LOKASI SIMPAN	SARANA TEMU BALIK
1.	Senarai Arsip Multi Subyek Pengolahan Tahun 2002	143 nomor berkas	Depo Arsip DPAD DIY	
2.	Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 1 (Kurun Waktu 1931-1979) Pengolahan Tahun 2002	31 nomor berkas	Depo Arsip DPAD DIY	
3.	Senarai Arsip Jawatan Pemerintahan Umum Buku 2 (Kurun Waktu 1949-1973) Pengolahan Tahun 2003	5 nomor berkas	Depo Arsip DPAD DIY	

- KHAZANAH ARSIP KRATON YOGYAKARTA

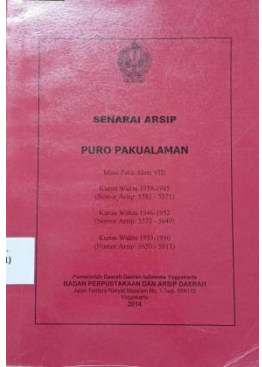
NO	DAFTAR ARSIP	JUMLAH	LOKASI SIMPAN	SARANA TEMU BALIK
1.	Senarai Arsip Kraton Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX Kurun Waktu 1940 - 1988 (Pengolahan Tahun 2008)	38 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
2.	Senarai Arsip Kraton Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX Kurun Waktu 1940 - 1988 (Pengolahan Tahun 2009)	20 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	

3.	Senarai Kraton Yogyakarta (Tahun Pengolahan 2010)	53 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
4.	Senarai Arsip Kraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Pengolahan 2012)	3 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
5.	Senarai Arsip Kraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Pengolahan 2014)	4 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
6.	Senarai Arsip Kraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Pengolahan 2016)	2 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
7.	Daftar Arsip Statis Kraton Yogyakarta (Pengolahan 2017)	4 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	

8.	Daftar Arsip Kraton (Pengolahan Tahun 2019)	3 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	
9.	Senarai Arsip Kraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Pengolahan 2020)	1 nomor berkas	KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta	

• **KHASANAH ARSIP PURO PAKUALAMAN**


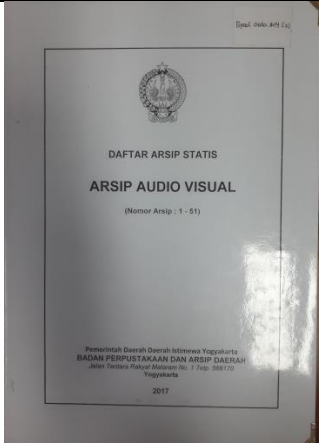
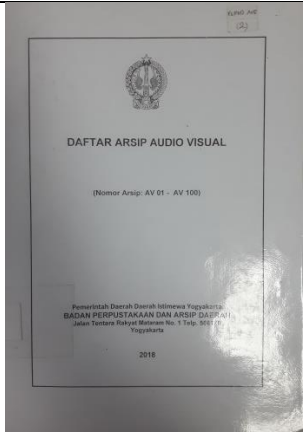
NO	DAFTAR ARSIP	JUMLAH	LOKASI SIMPAN	SARANA TEMU BALIK
1.	Senarai Arsip Puro Pakualaman Masa Sri Paku Alam VIII 9 (Nomor Arsip: 2641 – 3148) Pengolahan 2010	1 nomor berkas	Puro Pakualaman	
2.	Senarai Arsip Puro Pakualaman Masa Sri Paku Alam VIII (Nomor Arsip: 3149 – 3666) Pengolahan 2010	7 nomor berkas	Puro Pakualaman	
3.	Senarai Arsip Kadipaten Pakualaman (Kurun Waktu 1936 – 1973) Nomor: 4833 – 5380 Pengolahan 2013	2 nomor berkas	Puro Pakualaman	

4.	Senarai Arsip Puro Pakualaman (Masa Pakualam VIII) Kurun Waktu 1939-1990 Pengolahan 2014	21 nomor berkas	Puro Pakualaman	
----	---	-----------------	-----------------	---

b. Foto

NO	DAFTAR ARSIP	JUMLAH	LOKASI SIMPAN	SARANA TEMU BALIK
1.	Daftar Arsip Foto Koleksi Campuran	22 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	
2.	Daftar Arsip Foto Djawatan Penerangan DIY	134 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	
3.	Daftar Arsip Foto Indonesian Pers Photo Service (IPPHOS)	77 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	
4.	Daftar Arsip Foto Panglima Besar Jenderal Sudirman	78 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	

c. Audio Visual

NO	DAFTAR ARSIP	JUMLAH	LOKASI SIMPAN	SARANA TEMU BALIK
1.	Daftar Arsip Audio Visual Tentang Yogyakarta Tahun Pengolahan 2004	1 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	
2.	Daftar Arsip Statis Arsip Audio Visual Tahun Pengolahan 2017	1 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	
3.	Daftar Arsip Audio Visual Tahun Pengolahan 2018	7 nomor	Depo Arsip DPAD DIY	

**Uraian diskripsi arsip terlampir*

7.4 Dokumentasi visual (jika tersedia dan sesuai)

**Dokumen terlampir*

7.5 Riwayat Provenance / Asal-Usul Arsip

Arsip-arsip dengan tema Jogja sebagai Ibu Kota Republik Indonesia yang menjadi khazanah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berasal dari beberapa pencipta arsip yaitu Djawatan Pradja DIY dan Djawatan Penerangan DIY.

Arsip Djawatan Pradja DIY merupakan warisan informasi Pemerintah Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Pradja Pakualam pada masa revolusi fisik tahun 1945 - 1950. Arsip tersebut diperoleh dari Kompleks Kepatihan, Danoeredjo, Yogyakarta. Arsip dimaksud ditemukan di berbagai lokasi dan terakumulasi dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1970-an. Selanjutnya arsip-arsip tersebut disimpan Biro Umum Setwilda Propinsi DIY selaku unit kearsipan Setwilda Propinsi DIY. Demikian halnya dengan arsip yang Jawatan Pemerintahan Umum, arsip tersebut juga tersimpan di Biro Umum Setwilda Propinsi DIY selaku unit kearsipan Setwilda Propinsi DIY yang dikemudian hari merupakan cikal bakal terbentuknya Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY.

Pada tahun 1994 telah dibentuk Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY. Pada waktu itu Kantor Arsip Daerah merupakan Records Center Pemerintah Daerah Propinsi DIY. Institusi tersebut mempunyai fungsi mengelola arsip inaktif Pemerintah Daerah Propinsi DIY. Dengan terbentuknya Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY, arsip Djawatan Pradja kemudian tersimpan di Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY, yang terletak di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 1 Yogyakarta.

Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah dicabut dan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut kemudian terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang berazaskan dekonsentrasi menjadi pemerintahan otonom atau otonomi daerah. Hal ini berakibat urusan pengelolaan arsip statis yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian Lembaga Kearsipan Daerah yang semula hanya mengurus urusan arsip dinamis, dengan adanya otonomi daerah urusannya bertambah sebagai pengelola arsip statis daerah atau Regional Archives. Dengan adanya otonomi daerah ini, pada tahun 2001 Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY digabung dengan Perpustakaan Daerah Propinsi DIY mejadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi DIY. Perpustakaan Daerah merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Perpustakaan Nasional RI.

Adanya penyerahan urusan pengelolaan arsip statis kepada daerah, pada tahun 2002 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengawali kegiatan pengolahan arsip statis untuk arsip yang diperoleh dari Komplek Kepatihan Danoerejo. Kegiatan tersebut menghasilkan Daftar Arsip Statis, untuk lingkungan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dikenal dengan sebutan Senarai. Kegiatan tersebut berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan 2018. Pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2019, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY berubah nomenklatur menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

Seiring dengan kebutuhan depo arsip yang sesuai standar dan bisa menampung seluruh khasanah dan koleksi arsip yang dimiliki, maka pada pertengahan tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY menempati gedung baru di Jl. Janti Banguntapan Bantul. Khasanah arsip inaktif disimpan di lantai 4 dan khasanah arsip statis disimpan di lantai 5 dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 1.400 m².

Arsip Djawatan Penerangan DIY merupakan arsip milik instansi vertikal sehingga arsip-arsip tersebut kemudian diakuisisi dan disimpan oleh Perwakilan Arsip Nasional RI di Jawa Tengah atau ANRIWIL JATENG yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudi, Srandol, Jawa Tengah. Dengan adanya otonomi daerah, maka arsip-arsip Djawatan Penerangan DIY diserahkan oleh ANRIWIL JATENG ke Kantor Arsip Daerah Propinsi DIY selaku Lembaga Kearsipan Daerah Propinsi DIY bersama dengan arsip-arsip yang lainnya seperti arsip BP-7, arsip Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain.

7.6 Bibliografi

- Amila Vanima L, Dr. Farabi Fasih, M.Phil. (2022). *Pentas Sandiwara di Ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta 1946-1949*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209372>
- Atmakusumah., (. (1982). *Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkuk Buwono IX*. Jakarta: PT Gramedia.
- DIY, T. P. (2017). *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dr. P.J. Suwarno, S. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 - 1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius.

- Dr. Sri Margana, M.Hum.,M.Phil., Dra. Sri Ratna Saktimulya, M.Hum., Dra. Mary Condronogoro. (2010). *Serat Kojar Sapala: Perlawanan Sultan Hamengku Buwono IX Terhadap Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta*. Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Drs. Tashadi; Drs. Suratmin; Mulyono, B.A.; Poliman, B.A. (1991). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Di Dearah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Jogjakarta, D. P. (1953). *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Kementerian Penerangan.
- Penyusun, T. (2017). *Naskah Sumber Arsip Laskar Rakyat: Pembentukan Pemerintahan Slpil dan Laskar Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta diawal Kemerdekaan*. Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Putri Indah R, Nur Aini Setiawati, Ph.D. (2022). *Kehidupan Fatmawati Soekarno dan Siti Rahmiati Hatta sebagai Figur Ibu Negara selama Masa Pengungsian di Yogyakarta 1946-1949*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/207429>
- Soegijono. (1953). *Kissah Dajtuhnya Ibu Kota Republik Indonesia Jogjakarta*. Yogyakarta: Nusantara.
- Soekamto, R. E. (2009). *Yogyakarta Ibukota Perjuangan*. Yogyakarta: Narasi.
- Suhartono, WP; P.J. Suwarno; A. Adaby Darban; Darto Harnoko; Yuwono, DP.; Langgeng, SB. (2002). *Yogyakarta Ibukota Republik Indonesia: 4 Januari 1946 - 27 Desember 1949*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutrisno Kutoyo dkk. (1997). *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: CV Eka Dharma.

7.7 Nama, kualifikasi, dan detail kontak minimal tiga orang Pakar atau Organisasi Independen dengan pengetahuan keahlian tentang nilai dan arsip yang dinominasikan.

Nama Julianto Ibrahim, S.S.,M.Hum	Kualifikasi Dosen pada Departemen Sejarah FIB UGM	Alamat Jl. Sosio Humaniora no. 1 Bulaksumur, Yogyakarta Email juliantoibrahim@ugm.ac.id Telepone 0852-9264-5555
Nama Baha'uddin, S.S.,M.Hum	Kualifikasi Dosen pada Departemen Sejarah FIB UGM	Alamat Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta Email bahauddin@ugm.ac.id Telepone 081226563523
Nama G.P.H. Indrokusumo	Kualifikasi Pengageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman	Alamat Kadipaten Pakualaman Email Telepone 08122742280

Nama KRT Jatiningrat, S.H.	Kualifikasi Kerabat Dalem Kasultanan Yogyakarta	Alamat Tamanan, Kraton, Kota Yogyakarta Email Telepone (0274) 6208132
--------------------------------------	--	---

8.0 Penilaian terhadap kriteria seleksi

8.1 Kriteria utama – nilai signifikansi bagi bangsa.

8.1.1 Signifikansi Sejarah

- *Pergerakan Politik, ekonomi, sosial atau spiritual*
- a. Aspek Pergerakan Politik, Ekonomi, Sosial dan Spiritual

1. Aspek Politik

Keberadaan ibu kota bagi sebuah negara merupakan suatu hal yang mutlak. Tanpa adanya ibu kota maka negara tidak dapat dianggap eksis. Pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946 merupakan sebuah upaya untuk menjaga eksistensi negara Republik Indonesia yang ketika itu mendapat ancaman eksternal dari NICA (Netherlands-Indies Civil Administration), yakni sebuah tentara sekutu yang mempunyai tugas untuk mengontrol daerah-daerah yang berada di Hindia Belanda setelah jepang menyerah tanpa adanya syarat kepada sekutu pada saat perang dunia II. Bahkan pada tanggal 26 Desember 1945 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sutan Syahrir di Jakarta.

Kemudian, dengan pemindahan ibu kota RI di Yogyakarta maka roda pemerintahan juga dapat berjalan sekalipun dalam keadaan perang. Yogyakarta bahkan kemudian menjadi sasaran utama serangan Belanda melalui agesi militer kedua pada tahun 1948. Perlawanan rakyat terjadi di berbagai kapanewonan di wilayah Yogyakarta.

2. Aspek Ekonomi

Perpindahan ibu kota sudah barang tentu membawa dampak besar bagi perekonomian daerah ibu kota baru tersebut. Ditambah lagi pemerintahan RI di Yogyakarta ketika itu mengalami krisis keuangan akibat kekurangan dana untuk menggerakkan pemerintahannya. Berbagai cara digunakan untuk mendapatkan uang, seperti penyelundupan candu ke berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri. Dalam pada itu, Sultan HB IX sempat menukarkan berpeti-peti cerutu dengan ban mobil. Kemudian, untuk menggaji seluruh pegawai kantor dan instansi pemerintah RI, Sultan HB IX rela menggunakan kas kerajaannya. Pada tataran akar rumput, rakyat melakukan upaya-upaya penggalangan dana dalam bentuk fonds perang atau fonds kemerdekaan.

3. Aspek Sosial

Yogyakarta pasca kemerdekaan, keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota republik, kedatangan tantara hijrah dari Jawa Barat, hingga kemudian terjadinya Agresi Milliter Belanda kedua merupakan rangkaian peristiwa yang saling terkait. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian menjadikan kondisi yang memunculkan berbagai bentuk aksi rakyat termasuk didalamnya laskar rakyat. Pertambahan jumlah penduduk dalam waktu singkat akibat perpindahan ibu kota, yakni yang semula 170 ribu jiwa menjadi 600 ribu jiwa merupakan permasalahan tersendiri.

- *Tokoh terkemuka dalam sejarah Bangsa Indonesia*

Tokoh-tokoh yang banyak terlibat selama Yogyakarta berkedudukan sebagai ibu kota Republik Indonesia dalam rentang waktu tahun 1946 – 1949 di Yogyakarta antara lain Ir. Soekarno, Sultan Hamengku Buwana IX dan Jendral Soedirman. Ir. Soekarno merupakan presiden RI ketika itu, yang kemudian memutuskan untuk memindahkan ibu kota yang sekaligus juga pusat pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sultan HB IX sejak awal telah berinisiatif menawarkan Yogyakarta untuk dijadikan ibu kota RI kepada Soekarno Hatta. Sementara itu, Jenderal Soedirman merupakan pimpinan tantara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga wilayah Yogyakarta sebagai ibu kota RI dari serangan agresi militer Belanda. Disamping itu, selama ibu kota RI berkedudukan di Yogyakarta, dilakukan upaya-upaya diplomasi melalui perjanjian-perjanjian Indonesia – Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Kaliurang, Statement Rom Royen dan Konferensi Meja Bundar.

Salah satu perjanjian yang dilakukan di Yogyakarta adalah Perundingan Kaliurang dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang dilakukan tanggal 13 Januari 1948. Saat itu Indonesia diwakili oleh Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Sementara KTN terdiri dari Richard Kirby (Australia), Paul van Zeeland (Belgia), dan Frank Graham (Amerika Serikat). Kirby dipilih Indonesia sedangkan van Zeeland pilihan Belanda, dan Graham dari pihak netral.

- *Peristiwa penting yang mengubah Bangsa Indonesia*

Berikut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Yogyakarta selama menjadi ibu kota Republik Indonesia:

- **Perpindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Yogyakarta**

Pada tanggal 4 Januari 1946, para pemimpin pemerintahan Republik Indonesia meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dengan menaiki kereta api. Perjalanan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena adanya ancaman dari tantara Belanda. Dengan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan RI, Yogyakarta menjadi sasaran utama serangan Belanda dan sekutunya. Disamping itu, mobilisasi masyarakat ke Yogyakarta menjadi tidak terelakan.

- **Agresi Militer Belanda**

Agresi Militer Belanda terjadi dua kali. Agresi pertama terjadi pada bulan Juli 1947 dengan dalih bahwa Republik dianggap tidak menepati perjanjian Linggarjati. Kemudian, Agresi Belanda kedua terjadi pada bulan Desember 1949. Operasi militer ini ditujukan untuk melumpuhkan dan menguasai sepenuhnya Republik. Berbagai upaya diplomasi dilakukan selama kurun waktu tersebut.

- **Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, mengembalikan ibu kota RI dari Yogyakarta ke Jakarta.**

Dengan KMB ini maka Belanda secara resmi mengakui kedaulatan RI. Sebagai tindak lanjutnya dilakukan penyerahan kedaulatan dan selanjutnya ibu kota Republik Indonesia kembali ke Jakarta. Akan tetapi, RI yang selama ini berkedudukan di Yogyakarta setelah pindah ke Jakarta, berdasarkan isi Konferensi Meja Bundar, beralih menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

- *Tempat spesifik yang memiliki nilai penting*

- **Gedung Agung**

Ketika ibu kota RI ada di Yogyakarta, Gedung Agung merupakan Istana Kepresidenan dan tempat tinggal Presiden Soekarno beserta keluarganya, sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta tinggal di gedung yang sekarang ditempati Korem 072/Pamungkas.

- **Kraton Yogyakarta**

Disamping sebagai tempat kedudukan Sri Sultan HB IX, pada masa revolusi

fisik, atas perkenan Sri Sultan, keraton difungsikan juga sebagai tempat persembunyian bagi para pejuang dan sekaligus sebagai tempat menyusun strategi perlawanan. Bahkan sejak terjadinya agresi militer kedua, Keraton, Puro Pakualaman dan Kepatihan merupakan daerah aman, yakni daerah disitu yang tidak boleh ada tembak menembak dan Belanda dilarang masuk ketiga area tersebut.

- Puro Pakualaman

Puro Pakualaman merupakan tempat singgah sementara bagi Presiden dan wakil presiden serta para menteri tinggal selama tujuh pekan pada awal kedatangan para pemimpin republik ke Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena menunggu proses perbaikan istana negara Gedung Agung yang saat itu rusak sepeninggal Jepang.

- Kaliurang

Pada 13 Januari 1948, Kaliurang dipilih sebagai tempat perundingan khusus yang membahas permusuhan Indonesia-Belanda dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Saat itu Indonesia diwakili oleh Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan Jenderal Sudirman. Sementara KTN terdiri dari Richard Kirby (Australia), Paul van Zeeland (Belgia), dan Frank Graham (Amerika Serikat). Kirby dipilih Indonesia sedangkan van Zeeland pilihan Belanda, dan Graham dari pihak netral. Perundingan ini digelar karena pemerintah RI dan partai-partai politik di Yogyakarta tidak dapat menerima isi pokok Perundingan Renville yang mulai dihelat pada 8 Desember 1947. Pembicaraan Kaliurang yang tepatnya dihelat di sebuah penginapan di Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun, Pakem, menghasilkan Notulen Kaliurang yang menyatakan RI tetap memegang kekuasaan atas daerah yang dikuasainya pada waktu itu.

- *Adat istiadat tradisional (termasuk kearifan lokal)*

Pemindahan ibu kota RI ke Yogyakarta tidak lepas dari sosok Sri Sultan HB IX dan berbicara tentang Sri Sultan HB IX maka akan terkait dengan keraton. Keraton dalam hal ini Kasultanan Yogyakarta, merupakan pusat budaya dan nilai-nilai ketradisional. Bahkan pembiayaan pemerintahan pusat ketika itu diambilkan dari kas keraton. Kemudian pada waktu pemerintahan RI akan kembali lagi ke Jakarta, Sri Sultan menyampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi, silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta. Kemudian, Sultan menyerahkan cek sejumlah 6 juta gulden kepada Soekarno.

- *Hubungan dengan negara lain atau komunitas lain , antar daerah, antar provinsi, antar suku, atau antar desa*

Sejak awal perpindahannya, RI Yogya sudah bersinggungan dengan negara lain. Bahkan perpindahannya pun dikarenakan oleh adanya konflik dengan negara lain, yakni sekutu. Kemudian selama berkedudukan di Yogyakarta terjadi beberapa kali perjanjian dengan Belanda yang diantaranya melibatkan negara-negara ketiga sebagai penengah, misalnya Australia, Amerika dan Belgia.

- *Perubahan struktur kehidupan dan budaya*

Pemindahan ibu kota membawa perubahan struktur sosial masyarakat bahkan budaya. Mobilisasi penduduk ke Yogyakarta yang meningkat drastis dalam waktu singkat yang antara lain terdiri dari para pejabat pemerintahan RI dan keluarganya yang mencapai ratusan ribu orang, akan menimbulkan permasalahan sosial tersendiri. Penduduk baru tersebut akan menambah struktur lapisan masyarakat tersendiri dalam stratifikasi masyarakat lama yang telah mapan. Kemudian, peristiwa agresi militer, terutama yang kedua, memberikan dampak luas di kalangan masyarakat. Tindakan Belanda yang sangat represif telah direspon dengan munculnya perlawanan di kepenewonan-kepenewonan.

Peristiwa Suryawijayan, sebagaimana dikisahkan dalam Serat Kojar Sapolo, merupakan satu contoh tindakan Belanda terhadap penduduk. Dalam peristiwa itu, penduduk di kampung Pancakusuman, Daengan dan SUryawijayan dikumpulkan oleh serdadu Belanda. Mereka digiring seperti bebek kemudian ditembak dengan metrallier. Korban tewa diperkirakan lebih dari 43 orang.

8.1.2 Bentuk dan Corak

Khasanah arsip Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagian ada yang beraksara Jawa dan berbahasa Jawa.

Arsip-arsip dari KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta memiliki keunikan dan estetika tersendiri. Terdapat satu arsip beraksara Jawa tentang Pidato Ngarsa Dalem Sultan HB IX tertanggal 2 Agustus 1947 perihal perlawanan agresi Belanda dengan kekuatan rakyat. Kemudian, banyak arsip-arsip yang juga terdapat di KHP Widya Budaya Kraton Yogyakarta yang menggunakan Bahasa Jawa.

Beberapa contoh arsip yang menggunakan Bahasa Jawa antara lain terdapat dalam Senarai Arsip Kraton Masa Sri Sultan Hamengku Buwono IX Kurun Waktu 1940 - 1988. Pada nomor 808 terdapat arsip tekstual berisi surat dari Panitia Kapujanggan Kraton kepada Sekretaris Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pemberian sesebutan/ganjaran kepada abdi dalem yang berjasa kepada negeri sewaktu Yogyakarta dikuasai Belanda, Kemudian pada nomor 2203 berisi Surat dari Parentah Hageng Karaton kepada Pengageng Kawedanan Kanayakan perihal tanggal 1 Mei 1947 abdi Dalem yang melaksanakan pekerjaan Tentara Republik Indonesia tidak menerima gaji dari Keraton tetapi pangkat dan kalenggahan tetap.

Pada nomor 2011 merupakan arsip tentang Sabda Dalem Sri Sultan HB IX melalui RRI yang menginformasikan bahwa mulai tanggal 30 Juni 1949 pemerintahan sudah kembali dikuasai pemerintah RI lagi. Disamping arsip-arsip tersebut, masih terdapat banyak arsip lain yang juga menggunakan Bahasa Jawa.

8.1.3 Signifikansi Sosial, komunitas atau spiritual

Fakta-fakta sejarah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta tahun 1946 – 1949 disamping dapat dilacak dari informasinya dari sumber arsip, juga dikuatkan melalui jejak-jejak artefact, yakni objek fisik yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Artefak dapat berasal dari berbagai zaman sejarah dan budaya, dan dapat mencakup berbagai jenis benda seperti senjata, perhiasan, alat, patung, lukisan, dan lain sebagainya. Artefak dapat menjadi sumber informasi penting tentang kehidupan manusia pada masa lalu.

Sumber artefact terdapat di Puro Pakualaman antara lain berupa kamar yang dahulu dipakai oleh Bung Karno selama sekitar tujuh pekan diawal pemindahan ibu kota di Yogyakarta. Ketika itu Gedung Agung yang akan dipakai masih dalam perbaikan. Sampai saat ini kamar Bung Karno di Puro Pakualaman tersebut masih terjaga dengan baik termasuk meubeler yang ada didalam kamar tersebut.

8.2 Kriteria Pelengkap

8.2.1 Keunikan dan/atau Kelangkaan

8.2.2 Integritas (keutuhan/kelengkapan)

Arsip-arsip terkait dengan Yogyakarta sebagai ibu kota RI tahun 1946 – 1949 yang diajukan sebagai arsip Memori Kolektif Bangsa, baik arsip yang terdapat di DPAD DIY maupun di Kraton dan Kadipaten, dikelola dengan pendampingan dari DPAD DIY. Keberadaan DPAD dalam supervisi ini didasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Didalamnya dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini DPAD DIY mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan kearsipan di Kasultanan dan Kadipaten. Lingkup fasilitasi yang dimaksud meliputi penyusunan pedoman pengelolaan Arsip, pengolahan Arsip, Preservasi Arsip Statis dan Akses Arsip Statis. Melalui kewenangan tersebut, DPAD dapat memastikan keutuhan arsip-arsip Kasultanan dan Kadipaten termasuk didalamnya arsip dalam kurun waktu 1946 – 1949, yakni waktu dimana Yogyakarta berkedudukan sebagai ibu kota RI.

8.2.3 Kondisi

Kondisi arsip baik fisik maupun informasinya dapat terjaga dengan baik. Setiap tahun dianggarkan kegiatan pelestarian arsip. Pelestarian fisik arsip dilakukan dengan fumigasi, restorasi, kamperisasi, dan termite control. Sedangkan pelestarian informasi arsip dilakukan melalui alihmedia arsip dan alih aksara serta alih bahasa.

Kemudian, akses terhadap khazanah arsip baik yang terdapat di DPAD DIY, Kasultanan maupun Kadipaten dilakukan melalui finding aid yang telah dibuat dalam proses pengolahan dengan prosedur masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akses Arsip di DPAD DIY

Akses khazanah arsip DPAD DIY dapat dilakukan secara online melalui link <https://arsip.jogjaprovo.go.id>, dan dpad.jogjaprovo.go.id/siks. Kemudian, secara offline informasi khazanah arsip DPAD DIY dapat ditelusuri melalui Inventaris Arsip, Guide Arsip, Senarai Arsip, dan Naskah Sumber Arsip di Ruang Layanan Arsip DPAD DIY. Disamping itu, hasil alih media untuk arsip yang sudah dialihmediakan dapat diakses melalui jaringan intranet media akses DPAD DIY.

- Akses arsip di Kasultanan

Akses khazanah arsip Kasultanan Kraton Yogyakarta sebagian dapat dilakukan secara online melalui link <https://arsip.jogjaprovo.go.id>, dan dpad.jogjaprovo.go.id/siks. Kemudian, secara offline informasi khazanah arsip Kasultanan tersebut dapat ditelusuri melalui Inventaris Arsip, Guide Arsip, Senarai Arsip, dan Naskah Sumber Arsip. Pengunjung terlebih dahulu melakukan korespondensi dengan Kraton Yogyakarta untuk melakukan research arsip di KHP Widya Budaya. Apabila telah mendapatkan ijin akses, pengunjung dapat melakukan penelusuran arsip melalui finding aid yang ada di KHP Widya Budaya serta dapat melakukan penggandaan arsip sesuai dengan ketentuan KHP Widya Budaya.

- Akses arsip di Kadipaten

Akses khazanah arsip Kadipaten Pakualaman sebagian dapat dilakukan secara online melalui link <https://arsip.jogjaprovo.go.id>, dan dpad.jogjaprovo.go.id/siks. Kemudian, secara offline informasi khazanah arsip Kadipaten Pakualaman dapat ditelusuri melalui Inventaris Arsip, Guide Arsip, Senarai Arsip, dan Naskah Sumber Arsip. Pengunjung terlebih dahulu melakukan korespondensi dengan Kadipaten Pakualaman untuk melakukan research arsip. Apabila telah mendapatkan ijin akses, pengunjung dapat melakukan penelusuran arsip melalui finding aid yang ada di Layanan Arsip Kadipaten Pakualaman serta dapat melakukan penggandaan arsip sesuai dengan ketentuan setempat.

8.3 Tambahan Kriteria

8.3.1 Keautentikan

Arsip-arsip terkait Yogyakarta sebagai ibu kota RI tahun 1946 – 1949 dapat dilacak provenancinya secara jelas mengingat waktu yang belum terlalu lama dan keberadaan Yogyakarta yang telah memiliki pemerintahan sendiri sejak jaman lama. Pada masa kolonial, Yogyakarta telah memiliki pemerintahan yang disebut *zelfbestuur landschappen* atau otonom yang dalam Bahasa Jawa disebut *Prodjo Mandiri* atau swapraja, yaitu daerah kekuasaan raja yang memiliki kewenangan atau hak mengatur pemerintahan sendiri. Di Yogyakarta terdapat dua pemerintahan swapraja, yakni Sultanaat Zelfbestuur dan Pakoealaman Zelfbestuur. Dengan adanya kejelasan sejarah pemerintahan di Yogyakarta, maka pengolahan arsip dengan mendasarkan pada prinsip original order dan provenance dapat dilakukan dengan baik.

Metode dengan prinsip provenance dilakukan dengan cara mempelajari riwayat simpan arsip atau asal arsip diperoleh, kurun waktu, dan system penataan arsip. Akan tetapi, karena penataan sebelumnya belum dilakukan berdasarkan kaidah penataan arsip statis, maka dilakukan penelusuran transaksi surat tersebut ditujukan, tentang apa, dan dalam rangka

apa surat tersebut dikirim, serta kurun waktu arsip. Kemudian, untuk memastikan provenance arsip, didukung dengan sumber-sumber sekunder seperti bahan-bahan pustaka, koran dan lain-lain yang berkenaan dengan sejarah Djawatan Pradja. Dengan demikian rekonstruksi penataan arsip dapat merefleksikan fungsi Djawatan Pradja Nagari Kasultanan Yogyakarta dan Pradja Pakualaman ketika masih dinamis.

8.3 Pernyataan Signifikansi

Berdasarkan prinsip original order atau susunan asli dan prinsip provenance atau asal usul dalam pengolahannya, maka akan dapat memberikan gambaran tentang arsip tersebut. Prinsip susunan asli berarti bahwa arsip harus diatur dan dijaga dengan cara yang menghormati dan mempertahankan konteks sejarah dari pembuatan dan penggunaan arsip. Sedangkan prinsip asal-usul menuntut bahwa arsip harus diatur dan dijaga dengan mempertahankan informasi mengenai pembuatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan arsip, serta hubungan arsip dengan organisasi atau institusi.

Arsip-arsip tentang Yogyakarta sebagai ibu kota memiliki urgensi informasi dan bukti historis yang sangat tinggi bagi eksistensi negara RI. Keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota RI merupakan penggalan kisah perjalanan dinamika sejarah RI. Dengan demikian, apabila penggalan cerita sejarah tersebut hilang maka sejarah perjalanan negara RI akan kehilangan kontinuitasnya. Cerita yang disusun berdasarkan arsip maka ia akan menjadi sebuah cerita historis. Perjalanan sejarah RI hingga menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota nya dengan berbagai peristiwa yang terjadi didalamnya berdasarkan kekayaan arsip-arsip yang ada, tidak lagi bisa disebut sebagai peristiwa yang ahistoris dan imajinatif.

Sebaliknya, kehilangan arsip-arsip Yogyakarta ibu kota RI tahun 1946 – 1949, akan bisa berimplikasi pada peristiwa tersebut yang suatu saat pada sebagian kalangan akan dianggap sebagai sebuah kisah fiksi belaka sebagaimana cerita-cerita dalam pewayangan. Keberadaan Yogyakarta yang pernah menjadi ibu kota negara RI dan bisa jadi semua peristiwa yang ada didalamnya akan dianggap tidak pernah ada karena tidak ada fakta sejarah yang menjadi bukti peristiwa tersebut.

9.0 Konsultasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Berikan rincian konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait tentang pengajuan arsip tersebut.

Pemangku kepentingan yang terkait meliputi:

- **Pemilik/custodian arsip**
Pengajuan arsip Yogyakarta ibu kota RI tahun 1946 – 1949 sebagai arsip Memori Kolektif Bangsa melibatkan tiga pemilik arsip, yakni DPAD DIY, Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pada tanggal 1 Februari 2023 telah dilakukan audiensi dengan pihak Kadipaten Pakualaman. Kemudian audiensi tersebut diperdalam melalui konsultasi khusus dengan G.P.H. Indrokusumo, Pengageng Kawedanan Budaya dan Pariwisata Kadipaten Pakualaman. Kemudian, dengan pihak Kasultanan Yogyakarta telah dilakukan korespondensi yang kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi pada tanggal 27 Februari 2023.
- **Komunitas yang terlibat**
Paniradya telah menyelenggarakan 'Dialog Keistimewaan Sinau Sejarah' pada tanggal 4 Januari 2023 di SMA N 1 Bantul dengan tema Ibu kota Negara Pindah ke Jogja. Narasumber yang dihadirkan adalah Hendro Muhaimin, MA (Tenaga ahli Parampara Praja dan Staf Pusat Studi Pancasila UGM), Bahauddin, M.Hum (Sejarawan UGM), Agus Tony Widodo, S.Pd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah DIY), dan Widihasto Wasana Putra (Ketua Sekber Keistimewaan DIY).

- Cendekiawan / pakar
Diskusi tentang Yogyakarta sebagai ibu kota RI beserta arsip-arsipnya untuk diajukan sebagai arsip Memori Kolektif Bangsa antara lain telah dilakukan dengan Bapak Julianto Ibrahim, S.S., M.Hum, dosen Jurusan Sejarah UGM. Beliau mempunyai konsentrasi dalam kajian sejarah masa revolusi fisik.

10.0 Penilaian Resiko

Arsip-arsip yang diajukan sebagai Memori Kolektif Bangsa tidak dalam kondisi tidak aman atau mengalami ancaman resiko yang berarti. Arsip disimpan di Gedung Depo Arsip lantai 5, ruangan dilengkapi dengan sarana prasarana seperti AC, kunci pengaman, pemadam kebakaran, *smoke detektor*, *fire sprinkler system*, dan CCTV. Media penyimpanan arsip sesuai disesuaikan dengan fisik arsipnya yaitu menggunakan roll opact untuk menyimpan arsip tekstual dan rak non magnetik untuk menyimpan arsip foto dan arsip audiovisual.

11.0 Perencanaan Preservasi dan Akses Arsip

Arsip-arsip yang diajukan sebagai Memori Kolektif Bangsa sudah dilakukan pengelolaan mulai dari pengolahan, preservasi, dan layanan akses.

1. Anggaran Preservasi

Sudah ada anggaran preservasi diantaranya yang bersumber dari APBD maupun Dana Istimewa, diantaranya anggaran untuk kamperisasi, fumigasi, restorasi, dan alihmedia. Kamperisasi arsip dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali, sedangkan fumigasi dilakukan rutin setahun sekali. Untuk arsip-arsip yang mengalami kerusakan sebagian sudah dilakukan restorasi secara mandiri, yaitu dengan cara dilaminasi. Kegiatan restorasi akan terus dilaksanakan sampai seluruh arsip untuk melestarikan arsip. Arsip tekstual dan foto sebagian besar sudah dialih media. Untuk arsip-arsip yang belum dialihmediakan direncanakan akan dilakukan alih media secepatnya, dalam rangka pelestarian arsip maupun kemudahan dalam layanan akses arsip.

2. Sarana Prasarana Kearsipan

Arsip-arsip tersebut sudah tersimpan dengan menggunakan sarana prasarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan yang ditetapkan. Arsip tekstual disimpan dengan menggunakan sarana penyimpanan berupa boks arsip dan roll opact. Arsip foto disimpan dengan menggunakan sarana amplop foto, kotak foto, dan almari besi. Arsip kartografi disimpan dengan menggunakan sarana berupa almari kartografi. Arsip audio visual disimpan dengan menggunakan almari yang tidak mengandung medan magnet.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Arsip

SDM yang melakukan pengelolaan arsip terdiri dari arsiparis dan petugas arsip yang mempunyai latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang kearsipan. Selain berlatar belakang pendidikan bidang kearsipan, SDM yang ada juga sudah pernah mengikuti beberapa diklat teknis di bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh ANRI maupun Pemerintah Daerah, bahkan beberapa SDM juga pernah mengikuti magang pengolahan dan preservasi di ANRI.

4. Strategi Penanggulangan Bencana

Arsip-arsip yang diajukan sebagai Memori Kolektif Bangsa dalam kondisi aman dari bencana. Arsip ditempatkan di Gedung Depo Arsip lantai 5 yang aman dari bahaya banjir, disimpan dengan menggunakan sarana penyimpan berupa roll opact yang aman dari bahaya kebakaran. Ruang penyimpanan dilengkapi dengan sarana prasarana seperti AC, kunci pengaman, pemadam kebakaran, *smoke detektor*, *fire sprinkler system*, dan CCTV.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Akses Secara Luring dan Daring

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akses secara luring akan dibuatkan guide arsip dan naskah sumber arsip yang secara spesifik akan menampilkan arsip-arsip tentang tentang Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI Kurun Waktu 1946-1949. Sedangkan secara luring Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI Kurun Waktu 1946-1949 akan diupload secara lengkap ke aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

6. Sosialisasi.

Dalam rangka sosialisasi Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI akan dilaksanakan Pameran Arsip dengan materi yang sama pada Bulan Mei 2023 yang diawali dengan kegiatan Webinar. Disamping itu Arsip Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI juga sudah disajikan di Ruang 11 Diorama Arsip Jogja yang merupakan wahana edukasi unggulan DPAD DIY di bidang kearsipan yang menceritakan tentang Sejarah DIY sejak berdirinya Kerajaan Mataram pada masa Panembahan Senopati hingga era Keistimewaan.

12.0 Informasi lain yang dapat mendukung proses pengajaran

Khazanah arsip Yogyakarta sebagai Ibukota RI pernah digunakan oleh Bapak Julianto Ibrahim, SS, M.Hum (Sejarawan UGM) sebagai referensi dalam kegiatan Dialog Keistimewaan Napak Tilas Yogya Kota Revolusi dalam rangka Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

The poster is for a historical learning event. At the top, it features logos for 'Panitradya Keistimewaan', 'jogja istimewa', and 'SINERGI KEISTIMEWAAN DIY'. The main title is 'SINAU SEJARAH HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA DIALOG KEISTIMEWAAN NAPAK TILAS YOGYA KOTA REVOLUSI'. Below the title are three portraits of speakers: Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si (Panitradya Pati Keistimewaan); Julianto Ibrahim S.S., M.Hum (Sejarawan UGM); and Drs. Isdiyono (Guru Sejarah SMA Negeri 3 Yogyakarta). The event is scheduled for Wednesday, 01 March 2023, at 14:00 WIB, at SMA Negeri 3 Yogyakarta. It includes live streaming on 'Regol Bregada Trengginas' and video playback of a documentary '01 MARET 1949'. The event is moderated by Wiji Rachmadani and MC'd by Alit Jabang Bayi Agus Sunandar. It is supported by 'TARI GOLEK AYUN-AYUN SMA Negeri 3 Yogyakarta' and 'Padzchestra SMA Negeri 3 Yogyakarta'. Social media handles for 'Panitradya Keistimewaan' and 'DANA KEISTIMEWAAN' are listed at the bottom.

13.0 Checklist

Bagian 1

- 1.0 Judul;

Bagian 2

- 2.0 Ringkasan;

Bagian 3

- 3.0 Identitas Pemohon

Bagian 4

- 4.0 Klasifikasi Informasi

Bagian 5

- 5.0 Pernyataan Kewenangan telah ditandatangani serta terdapat tanggal;
- 5.0 Jika ini adalah nominasi bersama, bagian 5 dimodifikasi dengan tepat, dan ditandatangani

Bagian 6

- 6.0 Informasi Hukum
- 6.1 Detail pemegang hak warisan dokumenter jika berbeda dari pemilik

6.3 Detail status hukum

6.4 Detail Status Hak Cipta

Bagian 7

7.3 Daftar Rincian Arsip yang diajukan

7.4 Dokumentasi Visual

7.5 Sejarah/asal usul arsip

7.6 Bibliografi

7.7 Pakar/Organisasi independen

Bagian 8

8.1 Signifikansi – Kriteria Utama

8.2 Signifikansi – Kriteria Pelengkap

8.3 Tambahan Kriteria

8.4 Pernyataan Signifikansi

Bagian 9

9.0 Rincian konsultasi dengan pemangku kepentingan

Bagian 10

10.0 Penilaian resiko

Bagian 11

11.0 Perencanaan Pengelolaan arsip

Bagian 12

12.0 Informasi lain yang dapat mendukung proses pengajuan